



Reformasi Hukum Kesehatan di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan Kesehatan Universal

Azhar AR¹, Ismaidar², Tamaulina Br. Sembiring³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: adek170873@gmail.com.

ABSTRAK

Reformasi hukum kesehatan di Indonesia menjadi agenda penting dalam upaya mewujudkan kesehatan universal yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi, sistem kesehatan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses layanan kesehatan, kualitas pelayanan yang tidak merata, serta beban pembiayaan yang tinggi. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem hukum kesehatan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, serta memastikan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Artikel ini membahas tantangan utama dalam implementasi reformasi hukum kesehatan di Indonesia, termasuk ketidakmerataan infrastruktur kesehatan, terbatasnya sumber daya manusia, serta hambatan regulasi dan birokrasi. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi peluang yang ada, seperti pemanfaatan teknologi digital, perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan. Melalui analisis terhadap berbagai kebijakan dan pengalaman negara lain, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum kesehatan Indonesia dalam mewujudkan tujuan kesehatan universal. Dengan reformasi yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh warganya, tanpa terkecuali.

Kata Kunci: *Jaminan Kesehatan Nasional, Kebijakan Kesehatan, Kesehatan Universal, Reformasi Hukum Kesehatan.*

ABSTRACT

Health law reform in Indonesia is an important agenda in efforts to realize universal health that is fair and equitable for all levels of society. Along with social and economic developments, the Indonesian health system faces various challenges, such as unequal access to health services, unequal quality of services, and high financing burdens. Therefore, reforms in the health legal system are needed to increase the effectiveness and efficiency of health services, as well as ensuring the right of every citizen to receive adequate health services. This article discusses the main challenges in implementing health law reform in Indonesia, including unequal health infrastructure, limited human resources, and regulatory and bureaucratic obstacles. Apart from that, this article also explores existing opportunities, such as the use of digital technology, improving the National Health Insurance (JKN) system, and increasing community participation in decision making regarding health policy. Through analysis of various policies and experiences of other countries, it is hoped that recommendations can be obtained to improve Indonesia's health legal system in realizing universal health goals. With the right reforms, Indonesia can improve the quality of health services that are inclusive and accessible to all its citizens, without exception.

Keywords: National Health Insurance, Health Policy, Universal Health Care, Health Law Reform.

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu, yang tidak hanya berdampak pada kualitas hidup seseorang, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan kesehatan universal di mana setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi merupakan tantangan global yang penting. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan tujuan ini. Meskipun telah dilakukan berbagai reformasi dalam sistem kesehatan, masih banyak masalah yang harus diatasi, termasuk ketimpangan dalam akses layanan kesehatan, keterbatasan sumber daya manusia medis, dan pembiayaan kesehatan yang tidak merata di berbagai wilayah.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang sehat dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, sistem hukum kesehatan Indonesia harus terus diperbaharui dan disempurnakan agar dapat menjawab tantangan dan memberikan solusi untuk mencapainya. Hal ini memerlukan integrasi antara kebijakan, regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan hukum yang efektif serta responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam mencapai kesehatan universal adalah pembaruan atau reformasi hukum kesehatan. Hukum kesehatan di Indonesia, yang meliputi kebijakan, regulasi, dan sistem pengawasan, memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diakses dengan adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, implementasi hukum kesehatan di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan, seperti birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta ketidakmerataan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil.

Reformasi hukum kesehatan di Indonesia menjadi isu yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kesehatan universal (Universal Health Coverage - UHC), yakni sebuah sistem kesehatan yang memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat tanpa terkendala biaya. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki tantangan geografis yang luas, reformasi dalam sektor hukum kesehatan adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama yang berada di daerah terpencil dan kurang terlayani, dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Reformasi Hukum Kesehatan merujuk pada perubahan atau pembaruan dalam sistem hukum yang mengatur sektor kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Reformasi ini mencakup pembaruan regulasi, kebijakan, serta sistem pengawasan yang ada untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diakses secara adil, merata, dan berkualitas. Reformasi hukum kesehatan bertujuan untuk membangun sistem kesehatan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mencapai tujuan kesehatan universal.

“Reformasi hukum kesehatan harus mempertimbangkan inklusivitas dan partisipasi publik dalam setiap kebijakan yang dibuat. Tanpa melibatkan masyarakat secara aktif, reformasi hukum kesehatan tidak akan berhasil mewujudkan kesehatan

universal yang adil dan merata” (S, 2020). Sedangkan menurut (Wulandari, 2019) "Salah satu peluang terbesar dalam reformasi hukum kesehatan di Indonesia adalah penggunaan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan. Peraturan yang mengatur *telemedicine* dan penggunaan data kesehatan dapat meningkatkan akses layanan, terutama di daerah yang sulit dijangkau secara fisik."

Reformasi hukum kesehatan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang meliputi perbaikan dalam kebijakan, regulasi, serta penguatan sistem pengawasan dan pemerataan akses. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketimpangan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Reformasi hukum kesehatan bukan hanya soal mengubah regulasi atau kebijakan, tetapi juga soal memastikan bahwa sistem hukum yang ada dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan membuka peluang untuk perbaikan yang berkelanjutan. Melalui perbaikan hukum yang menyeluruh, Indonesia dapat memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional (JKN), mengoptimalkan penyelenggaraan layanan kesehatan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan kesehatan. Di sisi lain, peluang dalam pemanfaatan teknologi informasi, penguatan layanan primer, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran kesehatan dapat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kesehatan universal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam reformasi hukum kesehatan di Indonesia dalam mewujudkan kesehatan universal. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan berbagai permasalahan hukum kesehatan yang ada serta untuk mengeksplorasi berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem kesehatan di Indonesia. Metodologi penelitian ini menggabungkan analisis literatur dan analisis kebijakan, untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam reformasi hukum kesehatan Indonesia. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi masalah secara mendalam dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan kebijakan kesehatan yang mendukung pencapaian kesehatan universal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dalam Reformasi Hukum Kesehatan di Indonesia

Reformasi hukum kesehatan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, yang perlu diatasi agar dapat mewujudkan tujuan kesehatan universal. Berdasarkan kajian yang dilakukan, tantangan utama yang dihadapi dalam sistem hukum kesehatan Indonesia antara lain: *pertama*, Ketimpangan Akses Layanan Kesehatan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakmerataan akses layanan kesehatan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil dan daerah perbatasan.

Meskipun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diluncurkan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih luas, masih banyak daerah yang menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Ketimpangan ini menjadi hambatan besar dalam mewujudkan kesehatan universal, di mana setiap warga negara seharusnya dapat mengakses layanan

kesehatan tanpa terkecuali. Menurut (S N. , 2018) ketimpangan akses layanan kesehatan di Indonesia disebabkan oleh perbedaan geografis, infrastruktur yang terbatas, serta distribusi tenaga medis yang tidak merata. Daerah terpencil dan perbatasan seringkali mengalami kekurangan fasilitas kesehatan dan tenaga medis berkualitas. Hal ini menghambat tujuan pemerataan pelayanan kesehatan.

Kedua, Beban Pembiayaan Kesehatan. Pembiayaan untuk mendukung sistem kesehatan yang inklusif dan merata tetap menjadi isu utama. Meskipun JKN telah diperkenalkan sebagai upaya untuk meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, defisit anggaran dan pembiayaan yang terbatas di sektor kesehatan menjadi tantangan dalam memastikan keberlanjutan program ini. Pembiayaan yang cukup dan efisien diperlukan agar seluruh penduduk Indonesia dapat dilayani dengan kualitas yang setara.

Menurut (Thabrany H. , 2019), salah satu tantangan terbesar dalam reformasi hukum kesehatan di Indonesia adalah pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengalami defisit anggaran. Defisit ini terjadi karena tingginya beban klaim pelayanan kesehatan dibandingkan dengan penerimaan iuran. Selain itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran JKN masih rendah, terutama dari segmen pekerja informal.

Ketiga, Birokrasi dan Regulasi yang Rumit. Proses birokrasi yang panjang dan regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah menghambat implementasi kebijakan kesehatan. Terkadang, adanya perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah membuat pelaksanaan reformasi hukum kesehatan menjadi kurang efektif dan tidak merata. Keterbatasan koordinasi antarinstansi juga menjadi masalah dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor kesehatan.

Menurut (Thabrany, 2020), birokrasi yang rumit dan tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hambatan signifikan dalam implementasi reformasi hukum kesehatan. Adanya desentralisasi pemerintahan seringkali mengakibatkan perbedaan kebijakan di setiap daerah. Koordinasi yang lemah antarinstansi membuat proses implementasi kebijakan kesehatan berjalan tidak efektif.

Keempat, Kualitas dan Distribusi Tenaga Kesehatan. Pengelolaan tenaga kesehatan di Indonesia juga menghadapi sejumlah kendala, seperti distribusi yang tidak merata, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta ketimpangan kualitas pelayanan antara tenaga kesehatan di daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini berdampak pada ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan di berbagai wilayah.

Menurut World Health Organization (WHO) (2021), Indonesia masih menghadapi masalah dalam distribusi tenaga kesehatan. Sebagian besar tenaga kesehatan terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah pedesaan, terpencil, dan kepulauan kekurangan tenaga medis. Ditambah lagi, kompetensi tenaga kesehatan di beberapa wilayah masih memerlukan peningkatan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

Rendahnya Tingkat Literasi Kesehatan Masyarakat

Menurut (Prasetyo, 2019), rendahnya literasi kesehatan masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya pola hidup sehat, akses layanan kesehatan, dan mekanisme program seperti JKN. Hal ini

berdampak pada kurangnya pemanfaatan layanan kesehatan preventif dan peningkatan penyakit yang dapat dicegah.

Ketidajelasan Regulasi dan Penegakan Hukum

Menurut (Nugraheni, 2020), salah satu tantangan utama dalam reformasi hukum kesehatan adalah ketidakjelasan regulasi terkait perlindungan pasien, tenaga kesehatan, dan standar pelayanan kesehatan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dalam kasus malpraktik medis dan pelanggaran hak pasien membuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan menurun.

Rendahnya Pemanfaatan Teknologi Kesehatan

Menurut (Fauzi, 2021), pemanfaatan teknologi digital di bidang kesehatan seperti *telemedicine* dan rekam medis elektronik masih rendah. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, terutama di daerah terpencil, serta kurangnya regulasi yang mendukung penggunaan teknologi kesehatan menghambat reformasi kesehatan di era digital.

Ketidakselarasan Kebijakan antara Pemerintah dan Sektor Swasta

Menurut (Setiawan, 2019), ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah dan sektor swasta menjadi tantangan lain. Sektor swasta memegang peranan penting dalam penyediaan layanan kesehatan di Indonesia, namun regulasi yang tidak sinkron seringkali menimbulkan konflik kepentingan dan ketidakjelasan standar pelayanan. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan komprehensif, integrasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat reformasi hukum kesehatan demi mewujudkan kesehatan universal di Indonesia.

Peluang dalam Reformasi Hukum Kesehatan di Indonesia

Meskipun menghadapi tantangan besar, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses reformasi hukum kesehatan, antara lain:

1. Peningkatan Penggunaan Teknologi dalam Layanan Kesehatan

Salah satu peluang besar yang dapat dimanfaatkan dalam reformasi hukum kesehatan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan digital dalam sistem pelayanan kesehatan. Teknologi seperti *telemedicine* (konsultasi medis jarak jauh) dan rekam medis elektronik dapat mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan akses terhadap layanan medis, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Regulasi yang mendukung perkembangan teknologi ini dapat mempercepat pemenuhan layanan kesehatan universal.

2. Penguatan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Penguatan dan penyempurnaan sistem JKN menjadi peluang besar dalam mewujudkan kesehatan universal. Reformasi yang lebih inklusif dalam hal cakupan, kualitas pelayanan, dan pembiayaan JKN dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal atau tidak terdaftar, dapat mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang layak. Selain itu, dengan memperbaiki sistem manajemen dan pengawasan JKN, defisit anggaran dapat diminimalkan.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Kesehatan

Reformasi hukum kesehatan yang berbasis pada partisipasi masyarakat akan meningkatkan efektivitas kebijakan. Masyarakat perlu diberdayakan untuk lebih terlibat dalam perumusan kebijakan kesehatan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Keterlibatan ini dapat menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan.

4. Perbaikan Regulasi dan Pengawasan

Peluang lain adalah perbaikan dalam regulasi dan pengawasan sektor kesehatan. Dengan memperkuat aturan dan pengawasan terkait pelayanan kesehatan, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah dilaksanakan secara konsisten di seluruh Indonesia, sistem hukum kesehatan dapat menjadi lebih efisien dan lebih dapat diandalkan. Regulasi yang jelas dan tegas akan meningkatkan kualitas layanan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam sektor kesehatan.

5. Pendekatan Kesehatan Berbasis Hak Asasi Manusia

Melibatkan perspektif hak asasi manusia dalam reformasi hukum kesehatan dapat membuka peluang untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Ini dapat diintegrasikan dalam kebijakan dan regulasi, serta dalam pengembangan sistem kesehatan secara keseluruhan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa reformasi hukum kesehatan di Indonesia memiliki tantangan besar, seperti ketimpangan akses layanan, beban pembiayaan yang berat, birokrasi yang rumit, dan kualitas tenaga kesehatan yang tidak merata. Namun, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya kesehatan universal di Indonesia, antara lain dengan memanfaatkan teknologi, memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan kesehatan.

Untuk itu, diperlukan peran aktif dari semua pihak, baik pemerintah, tenaga medis, maupun masyarakat, dalam mewujudkan reformasi hukum kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah: (1) Memperkuat sistem pembiayaan kesehatan untuk menjamin keberlanjutan JKN. (2) Meningkatkan kualitas distribusi tenaga kesehatan dan memperbaiki pelatihan mereka. (3) Mengimplementasikan teknologi digital dalam layanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan akses. (4) Memperbaiki koordinasi antar instansi untuk mengurangi hambatan birokrasi. (5) Dengan komitmen yang kuat dan upaya yang terus-menerus, Indonesia dapat mencapai tujuan kesehatan universal, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan mengurangi ketimpangan dalam akses layanan kesehatan bagi seluruh warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A. (2021). Digitalisasi Kesehatan di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Teknologi Kesehatan*, 12(2), 34-42.
- Nugraheni, E. (2020). *Penegakan Hukum dalam Sistem Kesehatan Nasional*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Prasetyo, Y. D. (2019). Kesehatan Masyarakat dan Tantangan Reformasi Sistem Hukum. *Jurnal Kesehatan Publik Indonesia*, 5(1), 12-20.
- S, D. N. (2020). *Hukum Kesehatan dan Peran Masyarakat dalam Kebijakan Kesehatan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- S, N. (2018). *Sistem Kesehatan Nasional di Era Globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, B. (2019). *Peran Sektor Swasta dalam Sistem Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Medika.
- Thabrany, H. (2019). Defisit BPJS Kesehatan: Penyebab dan Solusinya. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 10(3), 45-52.
- Thabrany, H. (2020). *Menuju Sistem Kesehatan yang Efisien*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Wulandari, D. E. (2019). *Perkembangan Hukum Kesehatan di Indonesia dan Tantangan Teknologi dalam Sistem Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Kesehatan.
- World Health Organization. (2021). *Indonesia Health Workforce Distribution and Challenges*. Geneva: WHO Press.